

## REKAP 3: KEGIATAN K/L

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

#### TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. PROGRAM : DE - Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan  
03 - Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak (dihapus)  
04 - Meningkatnya pemenuhan hak anak  
06 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam KG, PHP, dan PA  
07 - Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO  
08 - Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus  
09 - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Satker Kemen PPPA
4. KEGIATAN : 2790 - Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Meningkatnya PUG di Bidang Politik dan Hukum		4.000.000,0
01.01	Persentase K/L Bidang Politik dan Hukum yang Melaksanakan Tagging ARG	22	
01.02	Persentase KL yang Memiliki Program Politik dan Hukum yang Responsif Gender	23	
01.03	Persentase Daerah yang Melaksanakan Kebijakan PUG di Bidang Politik dan Hukum (Output Kelembagaan PUG)	73	
01.04	Persentase Daerah yang Memiliki Program Politik dan Hukum yang Responsif Gender (PP)	38	
01.05	Persentase SDM Pendamping Program Pemberdayaan Politik dan Hukum yang Melaksanakan Kebijakan KGPPA (Paralegal Drafter dan SDM Terkait Penyusunan PerUU)	25	
01.06	Persentase Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum yang Ditindaklanjuti	100	
Total			4.000.000,0

#### 7. RINCIAN KEGIATAN

##### A. PEMETAAN KEGIATAN













KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								218.750,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								218.750,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								218.750,0
	053 - Penyelenggaraan Supervisi tentang Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan										200.000,0
		Provinsi Aceh	Provinsi Aceh								25.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								25.000,0
		Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat								25.000,0
		Provinsi Riau	Provinsi Riau								25.000,0
		Provinsi Jambi	Provinsi Jambi								25.000,0
		Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau								25.000,0
		Provinsi Banten	Provinsi Banten								25.000,0
		Provinsi Bali	Provinsi Bali								25.000,0
<b>Total</b>											4.000.000,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2021			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2021 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Meningkatnya PUG di Bidang Politik dan Hukum				4.000.000,0				4.410.800,0	4.872.000,0	5.403.400,0
01.AEA	Koordinasi	2	kegiatan		100.000,0				110.000,0	120.000,0	140.000,0
01.AEA.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan PUG Bidang Polkum	2	kegiatan		100.000,0	2	2	2	110.000,0	120.000,0	140.000,0
01.AEA.001.051	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik	1,0	Kegiatan	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	1,0	55.000,0	60.000,0	70.000,0
01.AEA.001.052	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Hukum	1,0	Kegiatan	50.000,0	50.000,0	1,0	1,0	1,0	55.000,0	60.000,0	70.000,0
01.DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	100	Orang		250.000,0				277.000,0	306.000,0	340.000,0
01.DCJ.001	SDM Pendamping Program Bidang Politik dan Hukum yang Mendapat Pelatihan Tentang Parameter KG dalam Pembentukan Peraturan Per-UU-an	100	Orang		250.000,0	100	100	100	277.000,0	306.000,0	340.000,0
01.DCJ.001.051	Penyusunan Modul Pelatihan Parameter KG dalam Pembentukan Peraturan Per-UU-an di K/L dan Daerah bagi para Legal Drafter	1,0	dokumen	150.000,0	150.000,0	1,0	1,0	1,0	165.000,0	180.000,0	200.000,0
01.DCJ.001.052	Pelaksanaan Pelatihan Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di K/L dan Daerah bagi Para Legal Drafter	100,0	orang	1.000,0	100.000,0	60,0	60,0	60,0	112.000,0	126.000,0	140.000,0
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2	Laporan		100.000,0				110.000,0	125.000,0	140.000,0
01.FAE.001	Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum	2	Laporan		100.000,0	2	2	2	110.000,0	125.000,0	140.000,0
01.FAE.001.051	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum	2,0	Dokumen	50.000,0	100.000,0	2,0	2,0	2,0	110.000,0	125.000,0	140.000,0
01.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5	Lembaga		600.000,0				665.000,0	735.000,0	810.000,0
01.QDB.001	K/L Bidang Politik dan Hukum yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG	5	Lembaga		600.000,0	5	6	7	665.000,0	735.000,0	810.000,0
01.QDB.001.051	Penyelenggaraan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum di K/L	5,0	K/L	20.000,0	100.000,0	7,0	7,0	10,0	110.000,0	125.000,0	140.000,0





KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
			RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
				RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
01.QDB.001.052	Penyelenggaraan Bimtek Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum di K/L	Utama	450.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450.000,0
01.QDB.001.053	Penyelenggaraan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum di K/L	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		2.950.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.950.000,0
01.UBA.001	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG di Bidang Politik dan Hukum		950.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950.000,0
01.UBA.001.051	Penyelenggaraan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum di Daerah	Utama	328.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328.000,0
01.UBA.001.052	Penyelenggaraan Bimtek Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum di Daerah	Utama	557.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	557.000,0
01.UBA.001.053	Penyelenggaraan Supervisi Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum di Daerah	Utama	65.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65.000,0
01.UBA.002	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan		2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.UBA.002.051	Penyelenggaraan Advokasi dan Sosialisasi tentang Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Utama	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0
01.UBA.002.052	Penyelenggaraan Bimtek tentang Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Utama	1.750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750.000,0
01.UBA.002.053	Penyelenggaraan Supervisi tentang Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
Total			4.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000.000,0

Jakarta, 30 Maret 2021

